

## PENGARUH UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Andini Dwi Indah Lestari<sup>1</sup>, Irvan Rahmantullah<sup>2</sup>, Jihan Rizki<sup>3</sup>, Maya Panorama<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah

jihanrizki4321@gmail.com

### Abstract

*Research aims to analyze the effect of debt and differences in government regimes on economic growth and poverty in Indonesia, (1940-2017). The study uses secondary data obtained from Bank Indonesia, National Development Planning Agency (Bappenas), the Central Statistics Agency (BPS), the World Bank, and other reference sources such as books, journals and scientific papers. The data used are the value of foreign debt, national income (GDP), population, number and ratio of the poor population, inflation rate in the period 1949 - 2017. The results of multiple regression analysis show: Foreign debt has a correlation with national economic conditions, especially the GDP and poverty. Debt tends to increase GDP and reduce poverty. In terms of debt a driver of the economy and poverty, the Soeharto Era and Habibie's Era tend to be different and better than the Soekarno Era. While Era Abdurrahman Wahid's debt management, Megawati Era, SBY Era and Jokowi's Era were no different or no better than Sukarno's Era. Although nationally can increase GDP and reduce poverty, debt cannot improve people's welfare. Foreign debt even tends to reduce the level of welfare of the people. This applies to all government regimes.*

**Keywords:** Indonesia, provety, GDP, Development, debt

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh utang dan perbedaan rejim pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia, (1940-2017). Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, dan sumber-sumber referensi lain seperti buku, jurnal maupun makalah ilmiah. Data yang dipakai adalah nilai utang luar negeri, pendapatan nasional (PDB), populasi, jumlah dan rasio penduduk miskin, tingkat inflasi pada periode 1949 - 2017. Hasil analisis regresi ganda dengan dummy variable menunjukkan hasil sebagai berikut: Utang luar negeri memiliki korelasi dengan terhadap kondisi perekonomian nasional, khususnya nilai Pdb dan tingkat kemiskinan. Utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. Dalam hal tata kelola utang sebagai pendorong perekonomian dan kemiskinan, Era Soeharto dan Era Habibie cenderung berbeda dan lebih baik dari Era Soekarno. Sementara tatakelola utang Era Abdurrahman wahid, Era Megawati, Era SBY dan Era Jokowi tidak berbeda atau tidak lebih baik dari Era Soekarno. Meski secara nasional dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, utang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (baca pendapatan perkapita). Utang luar negeri bahkan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat banyak. Ini berlaku untuk semua rezim pemerintahan.

**Kata Kunci:** Indonesia, kemiskinan, PDB, pembangunan, utang

### PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan diperlukan untuk perbaikan ekonomi sebuah negara. Indonesia, sebagai negarasedang berkernbang, memiliki kendala dalam mewujudkan program-program pembangunan untuk kernak-muran nasional. Pemerintah menghadapi

masalah keterbatasan modal untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan penerimaan dan pengeluaran atau adanya desifit anggaran pembangunan.

Dalam upaya mengatasi kesenjangan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian kebijakan baik berupa stimulus dari dalam negeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal). Selain menggenjot sumber-sumber penerimaan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan non pajak, pemerintah Indonesia dari masa ke masa telah menerapkan kebijakan utang luar negeri dan penanaman modal asing.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Sementara secara etimologi, utang atau *debt* (Inggris) berasal dari istilah Bahasa Perancis *dette* atau istilah Bahasa Latin *debitum* yang bermakna yang berutang." Istilah *debitur* konon pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-13

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan pinjaman sebagai utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangkan Pinjaman Luar Negeri adalah sejumlah dana yang diperoleh dari negara lain (bilateral) atau (multilateral) yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi, menutup saving-investment gap dan foreign exchange gap yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta

Menurut SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas (No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/ KET/5/1995) Pinjaman Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Orang, perusahaan maupun negara secara kelembagaan tak pernah lepas dari praktik utang-piutang. Tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Secara bisnis, utang sudah dianggap hal yang lazim untuk menambah modal usaha. Hal yang serupa terjadi dalam tata kelola suatu negara. Hampir semua negara, pernah bahkan terus berutang untuk menambah dana atau modal pembangunan nasionalnya. Indonesia, sebagai negara berkembang, punya sejarah panjang dalam hal utang atau pinjaman ke pihak luar, baik secara bilateral maupun multilateral lewat lembaga keuangan internasional dan regional.

Menurut Lincoln Arsyad (2010), utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang biasanya dipakai untuk membiayai deficit anggaran. Pertumbuhan yang tercipta pada gilirannya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Indonesia sendiri sudah lama mengenal utang luar negeri. Bahkan sebelum merdeka, sudah ada warisan utang dari peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Dari tahun ke tahun, utang luar negeri kita bertambah. Ini berlaku mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi sekarang. Pada awal kemerdekaan, Indonesia punya

1. "*Debt*". [www.etymonline.com](http://www.etymonline.com). *Online Etymology Dictionary*. Retrieved 20 May 2017

## 2. Lincoln Arsyad dalam *Ekonomi Pembangunan* (2010)

### TINJAUAN PUSTAKA

Produk Domestik Bruto/PDB ini merupakan total pendapatan yang dihasilkan didalam suatu negara, termasuk juga pendapatan orang asing yang bekerja di dalam suatu negara.

Secara normatif, setiap utang luar negeri digunakan Indonesia untuk belanja pembangunan. Harapannya, ikut membiayai berbagai proyek pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terindikasi dengan naiknya nilai PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan.

Dalam praktiknya, utang luar negeri tidak semuanya dibelanjakan untuk belanja pembangunan. Sebagian utang malah dipakai untuk menutup cicilan utang pokok dan bunganya. Penelitian Hernatasa (2004) menemukan adanya *Fisher Paradox*, situasi dimana semakin banyak cicilan utang luar negeri dilakukan, semakin besar akumulasi utang luar negerinya<sup>3</sup>. Kondisi serupa dikemukakan oleh peneliti lain bahwa cicilan plus bunga utang luar negeri secara substansial dibiayai oleh utang baru sehingga terjadi *net transfer* sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak pihak kreditur asing (Swasono dan Arief, 1999).

Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan. Hal ini karena sebagian besar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian ternyata tersedot oleh pengeluaran rutin yang sebagian besar teralokasi pada cicilan pokok dan bunga utang. Utang yang sasaran utamanya untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi beban pemerintah saat melakukan pembayaran utang tersebut. Pembayaran Hernatasa dalam *Analisis Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi* (Tesis, IPB, 2004). Cicilan pokok dan bunga utang luar negeri berpengaruh terhadap perekonomian karena pada kondisi tertentu pembayaran cicilan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian sehingga menghilangkan kontribusi positif dari utang luar negeri.

Utang luar negeri diperlukan untuk memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti dengan cara meningkatkan produksi (PDB), memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki neraca pembayaran. Namun, apabila utang digunakan secara tidak wajar maka kemungkinan utang tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan mengancam kestabilan makroekonomi negara.

Kondisi utang luar negeri Indonesia baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya tentu tidak lepas dari kondisi perekonomian sebelumnya. Dengan kata lain, buruknya kinerja perekonomian di tahun-tahun sebelumnya bisa jadi sebagai pendorong munculnya masalah utang luar negeri dewasa ini.

Sejak merdeka, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kepemimpinan nasional. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo. Setiap pemerintahan tentu punya kebijakan dan program prioritas yang berbeda. Meski begitu, pada setiap kurun pemerintahan, utang luar negeri selalu hadir untuk menambal deficit anggaran

pembangunan. Bagaimana mereka mengelola utang luar negeri dalam konteks pembangunan, yakni mengerakkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menarik untuk dikaji. Bagaimana hubungannya antara Utang dengan PDB dan tingkat kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, dan sumber - sumber referensi lain dalam bentuk buku, jurnal maupun publikasi lainnya. Data yang dikumpulkan berupa data utang luar negeri, data Produk Domestik Bruto (PDB), data pendapatan nasional, data populasi, data jumlah dan rasio penduduk miskin, tingkat inflasi dan lain-lain. Data tersebut berupa data *time series* dari periode 1949 -2017.

Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Variabel terikat adalah jumlah penduduk miskin dan nilai PDB (US\$). Sedang variabel bebas adalah ada sembilan, yaitu jumlah utang (US\$), jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan *variable dummy* periode pemerintahan dengan era Pemerintah Orde Lama (Soekarno) sebagai pembanding atau rujukannya.

Data olahan dianalisis secara kuantitatif deskriptif dengan model regresi berganda dengan *dummy variable*. Pengaruh utang terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dapat diketahui dengan mengajukan Model Ekonometrika (PDB dan MISKIN) sebagai berikut:

$$PDB = \beta_0 + \beta_1 \text{Utang} + \beta_2 \text{Penduduk} + \beta_3 \text{Inflasi} + \beta_4 \text{Era1} + \beta_5 \text{Era2} + \beta_6 \text{Era3} + \beta_7 \text{Era4} + \beta_8 \text{Era5} + \beta_9 \text{Era6} + \epsilon$$

$$MISKIN = \beta_0 + \beta_1 \text{Utang/PDB} + \beta_2 \text{Penduduk} + \beta_3 \text{Inflasi} + \beta_4 \text{PDB} + \beta_5 \text{Era1} + \beta_6 \text{Era2} + \beta_7 \text{Era3} + \beta_8 \text{Era4} + \beta_9 \text{Era5} + \beta_{12} \text{Era6} + \epsilon$$

PDB adalah variabel nilai produk domestik bruto tahunan. Miskin merupakan variabel angka kemiskinan (dinyatakan dalam jumlah penduduk atau rasio penduduk miskin dibanding jumlah penduduk Indo esia); Utang adalah indikator utang luar negeri dinyatakan dalam satuan persen. Populasi adalah jumlah penduduk Indonesia pada tahun berjalan. Inflasi adalah tingkat inflasi tahunan.

## PEMBAHASAN

Dari hasil penelusuran, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan secara lengkap. Terutama menyangkut data jumlah utang, nilai PDB, inflasi dan jumlah penduduk miskin. Dari berbagai sumber berikut adalah rekapitulasi data yang berhasil dikumpulkan penulis.

Tabel Data Utang, PDB, Populasi, Inflasi, dan Angka Kemiskinan 1949-2019

Tahun	Utang (Juta\$)	PDB (Juta\$)	Populasi	Inflasi	Miskin (Juta Orang)	Era Sistem Anggaran
1949	0.79	1.71	76948780	11	58.1	Berbasis Program
1950	0.514	1.78	78255665	10	57.1	Berbasis Program
1956	0.618	1.837	86002245	22	56.3	Berbasis Program
1963	1.7	1.2445	10155665	30	61	Berbasis Program
1966	2.015	1.6158	109593000	190	53	Berbasis Program
1969	2.437	2.593	118054000	9.9	47.5	Berbasis Program
1972	3.617	3.195	127466839	5.6	44.5	Berbasis Program
1976	8.295	37.269	134010690	5.8	53.6	Berimbang
1978	11.33	51.456	140665856	7.7	47.2	Berimbang
1980	12.994	72.482	147490365	13.5	42.3	Berimbang
1981	13.945	85.518	150978840	10.4	40.6	Berimbang
1984	16.8867	84.854	161555583	8.05	35.00	Berimbang
1987	12.1088	75.93	171728917	15.44	30	Berimbang
1990	15.9421	106.141	181436821	7.72	27.2	Berimbang
1993	20.1768	158.007	190879523	8.88	25.9	Berimbang
1996	24.987	227.37	199914831	8.85	34	Berimbang
1998	68.7	95.446	205715544	77.6	49.5	Terpadu
1999	132.2	140.001	208612556	2	37.3	Terpadu
2000	129.3	165.021	211540429	9.4	38.74	Terpadu
2001	122.3	160.447	214506502	12.55	37.87	Terpadu
2002	136.9	195.661	217508059	10.03	38.39	Terpadu
2003	135.4	234.772	220545214	5.16	37.34	Terpadu
2004	141.27	256.837	223614649	6.4	36.15	Terpadu
2005	134.5	285.869	226712730	17.11	35.1	Berbasis Kinerja
2006	132.63	364.571	229838202	6.6	39.4	Berbasis Kinerja
2007	141.18	432.217	232989141	6.59	37.17	Berbasis Kinerja
2008	155.08	510.229	236159276	11.06	34.96	Berbasis Kinerja
2009	172.87	539.58	239340478	2.78	32.53	Berbasis Kinerja
2010	202.41	755.094	242524123	6.96	31.02	Berbasis Kinerja
2011	225.17	892.969	245707511	3.79	30.12	Berbasis Kinerja
2012	252.37	917.87	248883232	4.3	29.25	Berbasis Kinerja
2013	266.11	912.524	252032263	8.4	28.17	Berbasis Kinerja
2014	293.33	890.815	255131116	8.4	28.28	Berbasis Kinerja
2015	310.73	861.256	258162113	3.4	28.59	Berbasis Kinerja
2016	317.09	932.259	261115456	3	28.01	Berbasis Kinerja
2017	357.5	978.872	264102584	4.3	27.77	Berbasis Kinerja
2018	377.3086	1,042.53	265053000	3.13	25.95	Berbasis Kinerja
2019	391.8276	1,101.95	266910000	3.49	25.41	Berbasis kinerja

Sumber: BPS, BI, Bappenas dan Rujukan lain diolah

Sejak merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami tujuh kali pergantian kepemimpinan nasional. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputeri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi). Untuk diketahui, setiap Era Pemerintahan tentu memiliki visi misi serta kebijakan dan program prioritas berbeda. Demikian pula, kebijakan dalam hal utang

luar negerinya. Dari tabel dan grafis terlihat bahwa jumlah utang dan PDB cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, pada semua periode pemerintahan. Pengecualian terjadi pada era Pemerintahan Abdurahman Wahid dimana pada masanya secara akumulatif ada penurunan jumlah utang luar negeri Indonesia. Sementara itu berdasarkan sistem anggaran, Indonesia mengalami setidaknya empat rezim anggaran. Pertama sistem anggaran berbasis program. Ini dimulai dari sejak Indonesia merdeka hingga periode 1973. Kedua, sistem anggaran berimbang berlaku selama periode 1974-1998. Ketiga, sistem anggaran terpadu, berlaku selama periode 1999-2004. Keempat, sistem anggaran berbasis kinerja, berlaku pada periode 2005 – sekarang.

Mengapa tata kelola utang era Jokowi tak berbeda dari era Soekarno, dan berbeda secara statistik dengan era Soeharto dan Era Habibie? Ini kajian menarik. Pada Era Soekarno, utang dikelola secara hati-hati digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan biaya pembangunan yang tak bisa ditutup oleh penerimaan dalam negeri. Pada Era Soeharto, utang luar negeri sepenuhnya digunakan untuk belanja pembangunan. Prosedur dan pengelolaan dengan disiplin anggaran yang ketat dan berimbang. Pada Era SBY, utang luar negeri dikelola dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Lantas apa bedanya dengan Era Jokowi. Di era ini, selain untuk menambal defisit anggaran, utang juga dilalokasikan untuk menuai cicilan utang pokok dan bunganya. Alokasi penggunaan utang terindikasi tidak disiplin. Buktinya, Menteri Keuangan dan Bappenas gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR yang meminta data rinci utang luar negeri dipakai untuk apa saja. Pada beberapa kesempatan, Menkeu Sri Mulyani juga mengakui Indonesia menambah utang baru antara lain untuk menutup cicilan utang.

Jadi utang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan yang benar-benar berdampak pada pertumbuhan produksi, roda perekonomian dan program pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, ada pos alokasi yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pembangunan.

Selain itu, dana hasil utang digunakan untuk antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak banyak berdampak langsung pada perekonomian nasional. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat dalam negeri, sebagian proyek padat karya justru banyak melibatkan tenaga kerja asing. Dalam tiga tahun terakhir, banyak media melansir derasnya arus masuk tenaga kerja asal China masuk Indonesia. Maka, logis jika pembangunan yang di antaranya dibiayai utang luar negeri tidak terlalu besar dampaknya bagi upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan Indonesia.

Secara teoritis, menurut Umar Juoro (1994), pada tahun 1950 dan 1960-an, dalam semangat duet ekonomi Harrod-Domar, bantuan luar negeri dipandang mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Sampai di situ, secara teori, bantuan luar negeri justru menghasilkan dampak pengganda (*multiplier effects*) yang positif pada perekonomian.

Data hasil analisis faktor pada menunjukkan hasil yang agak berbeda. Angka kemiskinan dipengaruhi secara nyata oleh variabel utang perkapita, jumlah penduduk, tata kelola utang Era Soeharto dan Era Habibie. Sementara variabel inflasi, tata kelola utang era Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY dan Jokowi tidak berdampak nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, tata kelola utang Era Soeharto dan Era Habibie lebih baik dalam arti terbukti secara empiris dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia dibanding regim lainnya yang pernah memegang tampuk pemerintahan di Indonesia. Tata kelola utang pada ke-4 era tersebut tidak berbeda dengan tata kelola utang Era Soekarno.

Dengan mengacu kepada data-data tersebut, nampak bahwa dalam memahami hutang ini, tidak dapat dilihat dengan cara terlalu menyederhanakan kesimpulan hubungan antara tingkat hutang dengan ketiga hal yang disebut pemerintah sebagai indikator kemakmuran rakyat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Utang yang besar bukan selalu berarti menunjukkan negara telah berada dalam kebangkrutan ekonomi. Sebaliknya, pihak pemerintah juga tidak dapat dengan mudah menyatakan bahwa hutang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat membawa pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dalam waktu yang singkat.

Menurut Anwar Nasution (2018), hadirnya UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15/2004 tentang Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Negara telah mengubah sistem pembukuan dari ala kolonial ICW ke pembukuan modern berdasarkan prinsip akuntansi modern. Pembukuan modern menggunakan dua sisi dengan sistem audit dan pertanggungjawaban berjenjang dan terjadwal jelas. Di masa Orde Baru, pembangunan {Pemda I dan II dilaksanakan melalui delapan jalur inores yang perencanaan dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Sejak tahun 2000, Pemda diberikan Pendapatan Asli Daerah, pembagian pendapatan pajak penghasilan, perseroan dan sumber daya alam serta tiga bentk tranfer ke daerah, yakni: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Anwar Nasution, 2018).

Sejatinya, utang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, Pattilo, Pairson dan Ricci pada tahun 2002, menemukan hubungan yang negatif antara utang dengan tingkat pendapatan perkapita. Dari 100 negara yang diteliti, mereka menemukan kontribusi utang terhadap pendapatan perkapita suatu negara adalah negatif untuk rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) yang berada pada kisaran persentase 35-45%. Temuan tiga ekonom tersebut ternyata masih relevan dengan kondisi Indonesia masa kini.

Pertanyaan berikutnya, apakah tata kelola utang pada setiap rezim pemerintahan berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat banyak. Penelitian Dedi Junaedi (2018) menggunakan data time seris 1949- 2017 menunjukkan bahwa rasio utang perkapita berkorelasi positif dengan angka pendapatan perkapita. Artinya semakin tinggi rasio utang terhadap PDB Indonesia cenderung meningkatkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia. Dengan kata lain bisa disimpulkan, utang selain dapat meningkatkan PDB dan menurunkan

angka kemiskinan, juga dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Ini bermakna bahwa pertumbuhan produksi secara nasional secara umum dapat dikatakan cukup berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan perkapita. Hasil riset dosen ekonomi Syariah IAI-N Laa Roiba itu membuktikan bahwa PDB perkapita dipengaruhi secara nyata oleh variabel jumlah penduduk, Era3 (Era Abdurrahman Wahid), Era4 (Era Megawati), dan Era5 (Era SBY). Korelasinya terbilang kuat dengan  $R^2 = 0,8832$ . Artinya model ini dapat menjelaskan 88,32 persen dinamika tatakelola utang.

Penelitian Dedi Junaedi (2018) yang disampaikan dalam Simposium Nasional Keuangan Negara 2018 di Badan Diklat Kementerian Keuangan RI di Jakarta, 14-15 Nopember 2018 diperoleh hasil bahwa variabel Utang\_PDB, Penduduk, Inflasi, Era Rezim Pemerintahan Soeharto dan Era Pemerintahan Habibie berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Jmiskin dengan  $R^2 0,9047$ . Rasio Utang/PDB dan Penduduk berkorelasi negatif dengan JMiskin, sementara Inflasi berkorelasi positif dengan JMiskin. Maknanya, semakin besar rasio Utang/PDB akan semakin banyak menurunkan angka kemiskinan. Demikian pula dengan jumlah penduduk, makin banyak jumlah penduduk akan semakin berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sementara pengaruh inflasi sebaliknya. Semakin tinggi inflasi akan meningkatkan jumlah penduduk miskin; semakin rendah inflasi akan semakin sedikit tekanan terhadap angka kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, rasio utang terhadap PDB dikatakan aman bila berada dalam rentang 21-49%. Sedang menurut IMF, rasio utang terhadap PDB aman bila berada dalam selang 26-49%. Rasio utang terhadap PDB yang menurun mengindikasikan beban pembayaran kembali utang terhadap perekonomian yang semakin rendah sehingga kesinambungan fiskal bisa terganggu. (Djamester A. Simarmata, 2007). Sementara itu menurut Reinhart et al (2003) batas aman rasio utang adalah 15% dari PDB.

Penelitian Dedi Junaedi (2018) menunjukkan hasil yang agak berbeda. Angka kemiskinan dipengaruhi secara nyata oleh variabel utang perkapita, jumlah penduduk, tata kelola utang Era Soeharto dan Era Habibie. Sementara variabel inflasi, tata kelola utang era Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY dan Jokowi tidak berdampak nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, tata kelola utang Era Soeharto dan Era Habibie lebih baik –dalam arti terbukti secara empiris dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia-- dibanding regim lainnya yang pernah memegang tampuk pemerintahan di Indonesia. Tata kelola utang pada ke-4 era tersebut tidak berbeda dengan tata kelola utang Era Soekarno.

Penelitian tentang relasi utang luar negeri dengan kemiskinan menginformasikan bahwa variabel Utang, PDB, Penduduk, Inflasi, Era1, dan Era2 berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Jmiskin dengan  $R^2 0,8937$ . Rasio Utang/PDB dan Penduduk berkorelasi negatif dengan JMiskin, sementara Inflasi berkorelasi positif dengan JMiskin. Maknanya, semakin besar rasio Utang/PDB akan semakin banyak menurunkan angka kemiskinan. Demikian pula dengan jumlah penduduk, makin banyak jumlah penduduk akan semakin berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sementara pengaruh inflasi sebaliknya.

Semakin tinggi inflasi akan meningkatkan jumlah penduduk miskin; semakin rendah inflasi akan semakin sedikit tekanan terhadap angka kemiskinan. (Dedi Junaedi, 2018).

Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Ekonomi Syariah Secara bahasa al-qardh berarti al-qoth' (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan qardh karena ia terputus dari pemiliknya. (Nasrun Haroen, 2000: 170) Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. (Basri, 2003: 60) Pengertian "sesuatu" dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. (Chairuman Pasaribu, 136) Pengertian al-qardh menurut istilah adalah penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. (Adiwarman Karim, 2007: 52)

Secara syari'i menurut Hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesapadanan yang diberikan untuk anda tagih kembali dengan nilai sepadan. Transaksi Qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Hadid (57) : 11

Dari perspektif pandang Islam secara umum ada dua pandangan terhadap hutang luar negeri. Pandangan pertama hutang luar negeri diperbolehkan asalkan bersistemkan external financing, karena dalam sistemnya sesuai Syariah dan bertujuan untuk saling membantu.[2] Seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dll. Sehingga dapat disimpulkan dalam pandangan pertama bahwa hutang luar negeri diperbolehkan dengan alasan untuk saling membantu. Adapun untuk pandangan kedua hutang luar negeri secara tegas dilarang, karena khususnya dizaman ini dimana mayoritas negara kreditur adalah bukan negara Islam. Sehingga akan terjadi riba didalam utang luar negeri, padahal sudah diterangkan secara jelas bahwa hutang ataupun hal transaksi ekonomi yang terdapat riba didalamnya adalah haram.[3] Jika dilihat ulang data diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia banyak melakukan pinjaman utang luar negeri kepada negara kreditur yang non Islam, sehingga sudah pasti mengandung riba. Jadi hutang luar negeri pada saat ini karena banyak negara non muslim yang menjadi kreditur, maka hutang luar negeri secara mayoritas adalah haram.

Menurut Tokoh Islam kontemporer masalah hukum hutang luar negeri terdapat tiga pendapat. Pertama menurut Mannan, Negara Islam Modern harus mengambil langkah utang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Pinjaman tersebut boleh dari lembaga atau negara non muslim, dengan syarat negara atau lembaga kreditur tidak memberi beban bunga atau riba.[4] Sehingga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam boleh saja meminjam ke negara atau Lembaga non-Islam, akan tetapi dengan syarat bebas bunga atau riba. Kedua menurut Umar Chapra hutang luar negeri adalah cara yang tidak efektif, selain tidak lepas dari unsur bunga hal tersebut juga memberatkan generasi berikutnya untuk membayar hutang tersebut. Menurut Umar Chapra cara terbaik selain hutang luar negeri

adalah dengan menaikkan pajak.[5] Sehingga dapat disimpulkan menurut Umar Chapra hutang luar negeri tidak efektif dan sebagai solusinya adalah memanfaatkan pajak. Adapun untuk yang ketiga yaitu Abdullah Qadim Zallum dengan cara yang hampir sama dengan Umar Chapra bahwasanya utang luar negeri bukanlah cara yang tepat, akan tetapi pajak atau kewajiban Kaum Muslimin yang harus diutamakan.[6] Sehingga menurut Abdullah Qadim Zallum bahwasanya hutang negara bukan menjadi solusi utama, akan tetapi solusi utama adalah kewajiban kaum muslimin itu sendiri.

Utang luar negeri adalah cara mendapatkan dana atau sumber daya secara instan, akan tetapi dibalik itu semua khususnya di zaman ini hutang luar negeri tidak terlepas dari bunga atau riba. Selain itu hutang yang terdapat juga juga membebani generasi yang akan datang dimana mereka harus membayar hutang tersebut bersama dengan bunganya. Oleh karena itu bangsa ini harus memutuskan apakah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang dikenal sebagai bangsa peminjam atau menjadi bangsa yang terhormat dan mandiri yang diridhai Allah swt.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Utang luar negeri memiliki korelasi dengan terhadap kondisi perekonomian nasional, khususnya nilai Produksi Domestik Bruto Indonesia dan tingkat kemiskinan. Utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. rakyat banyak. Ini berlaku untuk semua rezim pemerintahan.

Dalam hal tata kelola utang sebagai pendorong perekonomian dan kemiskinan, Era Soeharto dan Era Habibie cenderung berbeda dan lebih baik dari Era Soekarno. Sementara tatakelola utang Era Abdurrahman Wahid, Era Megawati Soekarnoputeri, Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Jokowi tidak berbeda atau tidak lebih baik dari Era Soekarno. Meski secara nasional dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, utang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (baca pendapatan perkapita). Utang luar negeri bahkan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan.

Kesimpulan bahwasanya hutang luar negeri akan menjadi boomerang ketika tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dalam beberapa hal, kondisi hutang luar negeri Indonesia saat ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Islam. Implikasinya adalah bahwa pemerintah perlu sebuah tinjauan kembali mengenai hutang luar negeri agar lebih sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang mana lebih mengedepankan sisi maslahat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Depdiknas. 2008. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Fandeli, Chafid, 1995. Potensi Obyek Wisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Yogyakarta: Liberty

- Joyosuharto, Sunardi, 1995. Aspek Ketersediaan (Supply) dan Tututan Kebutuhan (Demand) Dalam Pariwisata.
- Mardiana. 2006. Hubungan Perilaku Dengan Status Gizi Balita di Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Hinai. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum
- Peraturan Pemerintah Prov. Sumatera Selatan No. 12 Tahun 2009 tentang Ruang Lingkup.
- Pendit, Ny. S. 1990. Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana, PT Pandnya Paramita, Jakarta
- S. Saragih, Meriati, dkk. (2016). Buku panduan Museum negeri Balaputera Dewa Sumatera selatan. Palembang.
- Siagian, Sondang P. (2005). Manajemen Strategi. Jakarta: Bumi Aksara
- Spillane, J. J. (1987). Ekonomi pariwisata: Sejarah dan prospeknya. Kanisus.
- Wahyudi, Agustinus Sri. (1996). Manajemen Strategik, Pengantar Proses Berfikir Strategik. Jakarta: Binarupa Aksara
- Yenni Salim. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English. Jakarta: Press. Jakarta
- Yoeti, Oka A. (1985). Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Angkasa
- Junadi, Dedi. 2018. Relasi Utang Luar Negeri dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Studi Komparasi Antarezim Pemerintahan Indonesia. Makalah Simposium Nasional Keuangan Negara, 15-19 November 2018. Jakarta: Badan Diklat Kementerian Keuangan RI.
- Nasution, Anwar. 2018. Keuangan Internasional dan Perekonomian Indonesia. Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Depok: UI Press.

